

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perusahaan *Real Estate* Indonesia
- Ahmadi Miru, 2000, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Surabaya: Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Pelindungan Konsumen*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo, 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta Sinar Grafika .
- Burhan Ashshofa, 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- C. Djemabut Blaang. 1986. *Perumahan dan Permukiman Sebagai Kebutuhan Pokok*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Meriam Darus Badruzaman. 1994. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni Bandung.
- R. Soebakti. 2008. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermessa.
- Salim HS. 2013. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT. Grasindo.
- Soerjono Soekanto. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tri Budiyoni, 2011, *Hukum Perusahaan*, Salatiga: Griya Media.
- Urip Santoso. 2014. *Hukum Perumahan*. Jakarta: Prenadamedia.

Widodo. 2017. *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*. Jakarta: Raja Grafindo.

B. Kamus

Andi Hamzah. 2005. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgelijke Wetboek*)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang
Perseroan Terbatas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
Kontruksi.

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
1974 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Penyediaan dan
Pemberian Tanah untuk Keperluan Perusahaan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik
Indonesia Nomor 21/PRT/M/2016 Tentang Kemudahan dan/atau
Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan
Rendah.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik
Indonesia Nomor 26/PRT/M/2016 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 21/PRT/M/2016 Tentang Kemudahan dan/atau Bantuan
Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
552/KPTS/M/2016 tentang Batasan Penghasilan Kelompok
Sasaran KPR Bersubsidi, Batasan Harga Jual Rumah Sejahtera
Tapak, dan Satuan Rumah Sejahtera Susun serta Besaran Bantuan
Uang Muka Perumahan.

D. Website

<https://www.rumah123.com/panduan-rumah123/membeli-properti-1610-mengenal-kpr-dan-jenis-jenis-kpr-id.html#ZXlygC0DS7fwl3ix.99>. Diakses pada tanggal 9 November 2019 Pukul 22.53 WIB.

<https://www.simulasikredit.com/proses-pengajuan-kpr-dari-awal-sampai-disetujui/>. Diakses pada tanggal 7 Januari 2020 Pukul 22.51 WIB.

<https://m.hukumonline.com/klimik/detail/ulasan/cl2546/perjanjian-baku/>. Diakses pada tanggal 17 Juli 2020 Pukul 18.02 WIB.

